

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

Maulana Apriyadi¹, Marlon Satryo², Ayu Aulia Azzahra³, Naufal Aqil pp⁴, Richard Susanto⁵,
M.Ruslan Abdul Ghofur⁶.

Email: maulanaapriadi27@gmail.com, fajarindah8769@gmail.com,
azzahraayuaulia@gmail.com, aqilnaufal284@gmail.com, richardsusanto512@gmail.com,
Ghofurghofur46@gmail.com

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung,

Abstract

Pancasila is the foundation of the Indonesian state and the national ideology that serves as the basis for the formulation and implementation of the national legal system, including criminal law. The implementation of Pancasila values in the criminal justice system aims to establish law enforcement that is fair, humane, accountable, and non-discriminatory. This study aims to examine the implementation of Pancasila values in the national criminal law system, analyze the importance of justice in law enforcement, and assess whether the implementation of criminal law in Indonesia reflects the values of Pancasila. This study employs a qualitative descriptive method through a literature review of relevant legislation and academic literature concerning Pancasila, criminal law, and justice. The findings indicate that Pancasila values are reflected in the principles of respect for human rights, equality before the law, public protection, and the imposition of criminal sanctions in accordance with applicable legal provisions. However, law enforcement in Indonesia still requires improvement, particularly in terms of law enforcement officers' integrity, consistency in law enforcement, transparency, and the protection of citizens' rights. Therefore, improving the professionalism of law enforcement officers, strengthening oversight mechanisms, and increasing public legal awareness are necessary to ensure that the national criminal law system operates fairly and in accordance with the values of Pancasila.

Keywords: *Pancasila, national criminal law, justice, law enforcement, equality before the law.*

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, bertanggung jawab, dan tidak diskriminatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional, menganalisis pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, serta mengkaji kesesuaian penerapan hukum pidana di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan Pancasila, hukum pidana, dan keadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, persamaan kedudukan di hadapan hukum, perlindungan masyarakat, serta penerapan sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal integritas aparat, konsistensi penerapan hukum, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar sistem hukum pidana nasional dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata kunci: Pancasila, hukum pidana nasional, keadilan, penegakan hukum, persamaan di hadapan hukum.

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia (Mahmud et al., 2018). Setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Hal ini bertujuan agar hukum yang diterapkan dapat menciptakan keadilan, ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hukum memiliki peranan penting dalam menjaga keteraturan kehidupan masyarakat. Melalui hukum, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan. Hukum juga berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat, mencegah terjadinya pelanggaran, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan adil (Hasan, 2025).

Salah satu bagian penting dalam sistem hukum nasional adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara serta menentukan sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, menjaga keamanan, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan keadilan. Dalam penerapannya, hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku serta memperhatikan hak-hak setiap orang yang terlibat dalam proses hukum (Kumalasari, n.d.).

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional menjadi hal yang sangat penting karena hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai dan keadilan. Penegakan hukum yang baik tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, kepentingan korban, serta kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional penting dilakukan untuk memahami bagaimana setiap sila Pancasila dapat diterapkan dalam penegakan hukum, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional menjadi hal yang sangat penting karena hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Penegakan hukum yang baik tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, kepentingan korban, serta kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Andi Lala, 2021).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional penting dilakukan untuk memahami bagaimana setiap sila Pancasila dapat diterapkan dalam penegakan hukum, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Nilai Pancasila Diterapkan Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, proses penegakan hukum, dan penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Pancasila menjadi dasar dalam pembangunan hukum nasional,

sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Penerapan setiap sila Pancasila dalam hukum pidana dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Penerapannya tercermin dalam pentingnya nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus menjalankan tugas secara jujur dan tidak menyalahgunakan kewenangannya.
2. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Penerapannya dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia dan martabat setiap orang. Tersangka dan terdakwa harus memperoleh proses hukum yang adil, sedangkan korban juga berhak mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan hukum.
3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Penerapannya diwujudkan melalui penegakan hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, maupun status sosial. Hukum pidana juga berfungsi menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan masyarakat (Hasan et al., 2024).
4. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Penerapannya terlihat dalam proses peradilan yang mempertimbangkan fakta dan bukti secara objektif. Dalam perkara tertentu, penyelesaian melalui pendekatan yang berlaku.
5. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penerapannya diwujudkan dengan memberikan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Hakim juga perlu mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak tindak pidana, keadaan pelaku, dan kepentingan korban dalam menjatuhkan pidana sesuai ketentuan KUHP (Zainudin Hasan, Dodi Setiawan, et al., 2024).

B. Mengapa Keadilan Penting Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional?

Keadilan sangat penting dalam sistem hukum pidana nasional karena menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu proses hukum telah dilaksanakan secara benar, objektif, dan tidak memihak. Keadilan memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan kekayaan, jabatan, suku, agama, maupun status sosialnya.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, keadilan juga penting untuk melindungi hak asasi manusia, baik hak tersangka dan terdakwa maupun hak korban tindak pidana. Setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus diberikan kesempatan untuk membela diri dan memperoleh proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum (Rastra Samara et al., n.d.). Sementara itu, korban berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Arpansa & Hasan, 2025a; Hasan, n.d.).

Selain itu, keadilan diperlukan agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman tidak boleh diberikan secara sewenang-wenang atau dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Dengan adanya keadilan, masyarakat diharapkan memiliki kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.

Keadilan juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kedua sila tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum harus menghormati martabat manusia dan memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh masyarakat (Najih, 2018).

C. Apakah Hukum Pidana Di Indonesia Sudah Mencerminkan Nilai-Nilai Pancasila?

Hukum pidana di Indonesia secara prinsip sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tetapi penerapannya masih perlu terus diperbaiki agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, nilai sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tercermin dalam perlindungan hak asasi manusia dan hak seseorang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Kedua, sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, tercermin dalam prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial maupun jabatan seseorang (Arifin, 2023).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila (Arpansa & Hasan, 2025b). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan perbedaan kualitas pelayanan hukum yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat (Lala, 2019).

Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang transparan, tegas, dan tidak memihak. Aparat penegak hukum juga harus menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab (Saputra & Pratiwi, n.d.).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peranan penting dalam sistem hukum pidana nasional di Indonesia. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil, manusiawi, dan bertanggung jawab.

Keadilan sangat penting karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, kekayaan, maupun jabatan. Keadilan juga berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Secara prinsip, hukum pidana di Indonesia telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai peraturan dan prinsip penegakan hukum. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan sehingga diperlukan perbaikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh aparat penegak hukum harus menjalankan tugas secara profesional, jujur, transparan, dan tidak memihak agar nilai-nilai Pancasila benar-benar terwujud dalam sistem hukum pidana nasional demi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, jujur, transparan, dan tidak memihak serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam setiap proses penegakan hukum.

1. Bagi pemerintah, diharapkan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem hukum pidana nasional agar peraturan yang berlaku sesuai dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, menaati peraturan yang berlaku, menghormati hak orang lain, serta berpartisipasi dalam menciptakan
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, menaati peraturan yang berlaku, menghormati hak orang lain, serta berpartisipasi dalam menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan adil.
4. Bagi mahasiswa dan generasi muda, diharapkan dapat mempelajari serta memahami nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam sistem hukum nasional agar mampu berpikir kritis terhadap persoalan hukum dan turut mendukung terwujudnya keadilan di Indonesia.

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan sistem hukum pidana nasional dapat berjalan secara adil dan konsisten serta mampu mewujudkan cita-cita Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Lala. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 724-737.
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.286>
- Arifin, R. (2023). Pancasila Values in the New Indonesian Criminal Code: Does the Code More Humanist? *Journal of Law and Legal Reform*, 4.
- Arpansa, S., & Hasan, Z. (2025a). PENGUATAN ASAS LEGALITAS DAN PENGUATAN TERHADAP HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Judge : Jurnal Hukum*, 06. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1594>
- Arpansa, S., & Hasan, Z. (2025b). PENGUATAN ASAS LEGALITAS DAN PENGUATAN TERHADAP HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Judge : Jurnal Hukum*, 06. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1594>
- Hasan, Z. (n.d.). PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF JUSTICE.
- Hasan, Z. (2025). SISTEM PERADILAN PIDANA . CV. ALINEA EDUMEDIA .
- Hasan, Z., Hamaminata, G., Cahyono, R., & Guntur, M. (2024). Peran Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas Nanang Fahrozi Bandarsyah Universitas Bandar Lampung. *Politik Dan Sosial Indonesia*, (2), 57-69.
<https://doi.org/10.62951/aktivisme.v1i2.196>
- Kumalasari, R. (n.d.). Kebijakan pidana mati (Rosa) Halaman 1 KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAM Oleh. Retrieved www.wikipedia.id
- Lala, A. (2019). IMPLEMENTASI NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL. 4(5).

- Mahmud, A., Kunci, K., & Hukum Pidana, P. (2018). TRANSFORMASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (Vol. 4, Number 1). Online.
<https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>
- Najih, M. (2018). Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila Mokhammad Najih. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 2548-1584.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils>
- Rastra Samara, M., Cahyaningtyas, I., & Dewi, S. (n.d.). Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan Pancasila. Retrieved
<https://journal.unnes.ac.id/journals/integralistik>
- Saputra, D. S., & Pratiwi, A. A. (n.d.). Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tujuan Pemidanaan Berdasarkan KUHP Nasional. Retrieved
<https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/index>
- Zainudin Hasan, Dodi Setiawan, Angga Bela Dinata, Erlangga Adnus, & Andre Agape Lumban Gaol. (2024). Pancasila Dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia Yang Adil Dan Beradab. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 224-243.
<https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3048>
- Zainudin Hasan, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, & Amanda Putri Evandra. (2024). Penerapan Nilai - Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 138-150.
<https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>